



Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan karunia – Nya dalam membimbing dan memberikan kekuatan sehingga dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Kerja ini disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan kerja dinas untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung.

Pada Kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Bandung, 21 Mei 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDUNG
DINAS
PERHUBUNGAN

E. M. RICKY GUSTIADI, ATD., SE., MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19660824 198903 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja PD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja PD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja PD, orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

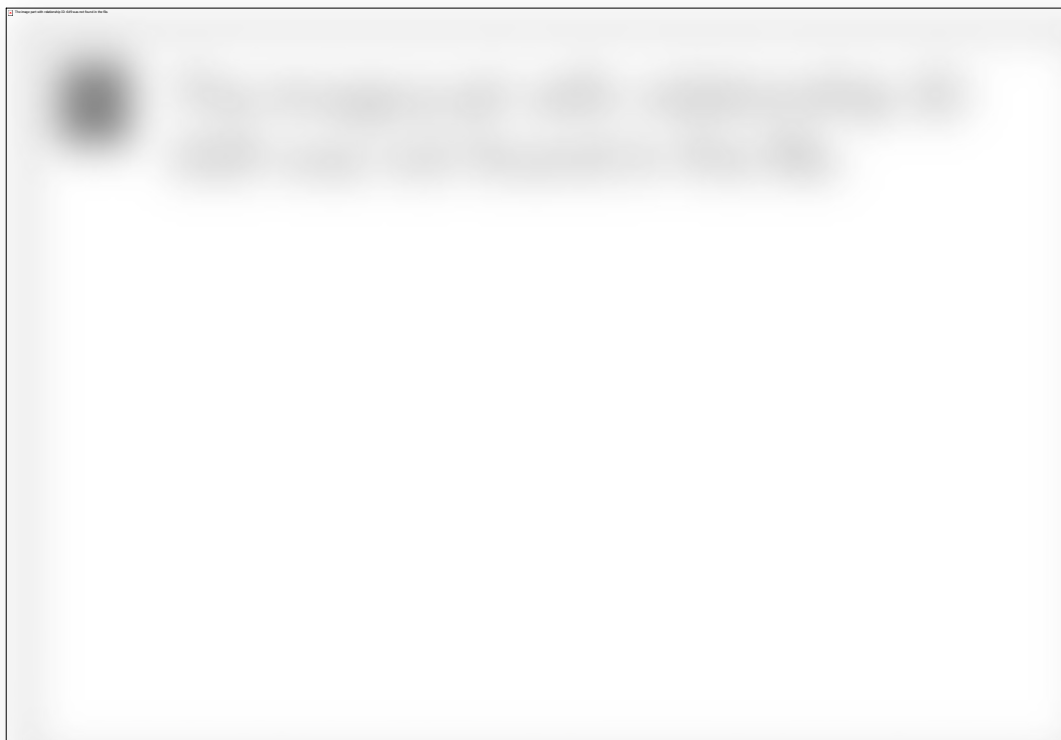
Sebagai sebuah dokumen resmi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung yang menjadi satu kesatuan untuk

mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bandung yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2019-2023 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja PD pada tahun 2020 ini merupakan tahun ke dua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Dinas Perhubungan Kota Bandung menyusun Renja Dinas Perhubungan secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Dinas Perhubungan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2022 dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja PD (Renja PD) Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sebagaimana tercantum dalam gambar berikut ini:



Gambar 1 : Diagram Alir Penyusunan Renja PD

Kepegawaian

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bandung sampai dengan bulan Juni 2018 memiliki pegawai sebanyak 446 orang. Adapun kondisi kepegawaian berdasarkan eselon jabatan:

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II B	Eselon III A	Eselon III B	Eselon IV A	Eselon IV B	Jlh
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretaris		1				1
3	Kepala Bidang			4			4
4	Kasubbag/Kasie/Ka UPT				18		18
5	Kasubbag TU UPT					3	3
	JUMLAH	1	1	4	18	3	27



Sumber :Subbag Umum dan Kepegawaian Dishub

Jumlah pegawai eselon II sebanyak 1 pegawai yaitu Kepala Dinas. Pegawai eselon III sebanyak 5 orang yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Transportasi, Kepala Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir, Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi dan pegawai eselon IV sebanyak 21 orang yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Kasubag Program Data dan Informasi, Kasi Perencanaan dan Evaluasi Transportasi, Kasi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi, Kasi Bina Transportasi, Kasi Manajemen Transportasi, Kasi Manajemen Perparkiran, Kasi Manajemen Angkutan, Kasi Ketertiban Transportasi, Kasi Pengamanan dan Pengawasan, Kasi Pengaturan Transportasi, Kasi Perlengkapan jalan, Kasi Sarana Angkutan, Kasi Prasarana, Kepala UPT Pengelolaan Terminal, Kepala UPT Angkutan, Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran, Kasubbag TU UPT Pengelolaan Terminal, Kasubbag TU UPT Angkutan dan Kasubbag TU UPT Pengelolaan Perparkiran. Pelaksana sebanyak 444 orang.

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1/ D4	D1- D3	SLTA	SLTP	SD	Jlh
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretaris		1						1
3	Kepala Bidang		4						4
4	Kasubbag		1	2					3
5	Kepala Seksi		2	9					11
6	Kepala UPT		2						2
7	Kasubbag TU UPT		1	2					3
8	Pelaksana		3	91	8	165	19	7	293
JUMLAH			20	104	8	165	19	7	318
	%		4,7	32,7	2,5	51,9	6,0	2,2	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dishub Kota Bandung

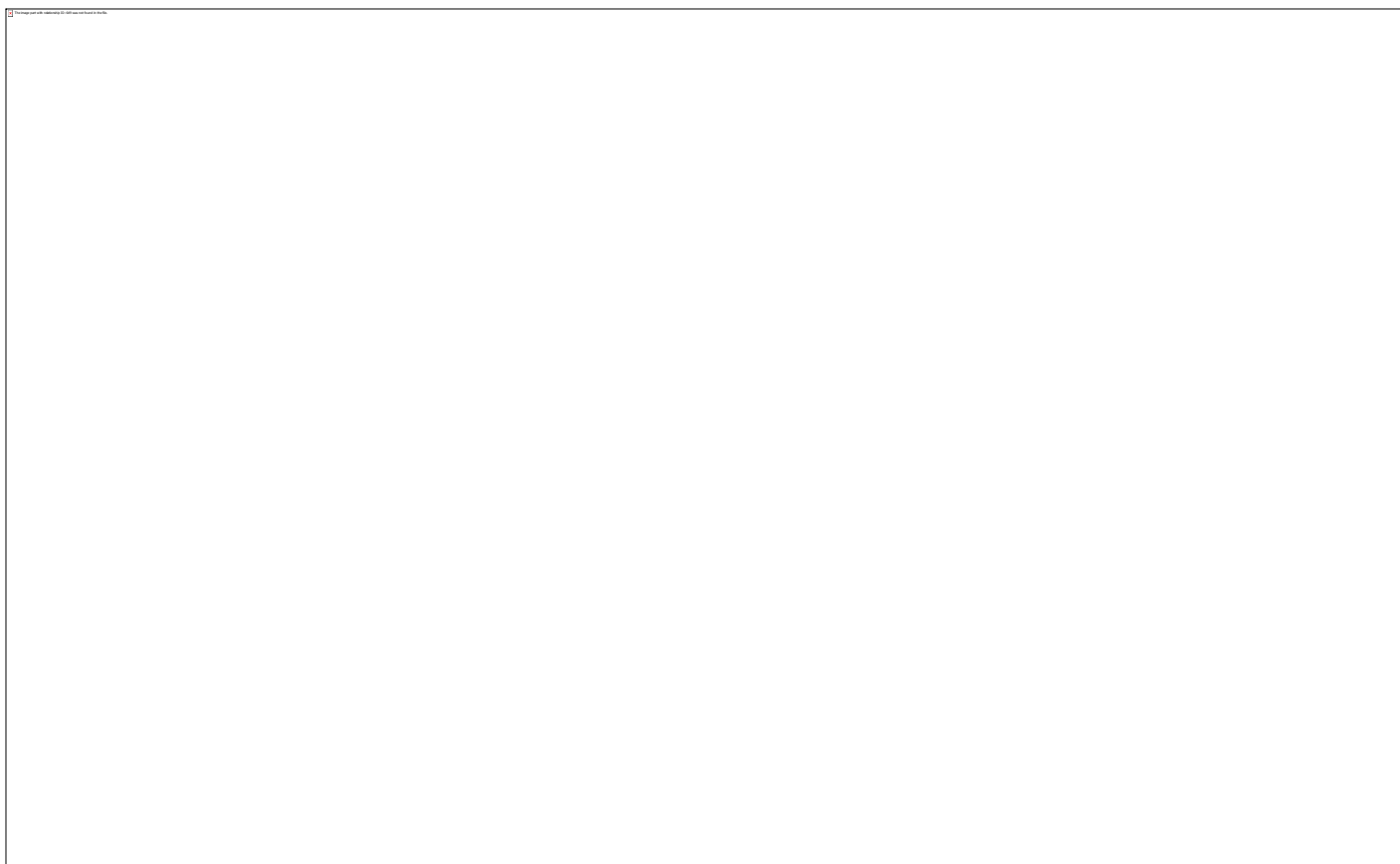
Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung, sebanyak 20 orang (4,7%) memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 1 orang Kasubbag, 2 orang Kepala Seksi, 2 orang Ka UPT, 1 orang Kasubbag TU UPT dan 3 orang Pelaksana, sedangkan sebanyak 104 orang (32,7%) memiliki pendidikan S1/D4, yaitu 2 orang Kasubbag, 9 orang Kepala Seksi, 2 orang Kasubbag TU UPT dan 91 orang pelaksana. Pegawai yang memiliki pendidikan D1-D3 sebanyak 8 orang (2,5%), 8 orang pelaksana, untuk pegawai lulusan SLTA 165 orang (51,9%), Lulusan SLTP 19 orang (6,0%), lulusan SD 7 orang (2,2%).

Dinas Perhubungan Kota Bandung berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan. Sebagai bagian dari unsur pelaksana Pemerintah Daerah, secara struktural Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung diangkat dan bertanggung jawab kepada Walikota Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung. Adapun kondisi pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung secara umumnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi berikut ini:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG

Lampiran: Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor :
Tanggal :



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perhubungan Kota Bandung dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat, membawahi:
 - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b). Sub Bagian Keuangan
 - c). Sub Bagian Program data dan Informasi
2. Bidang Perencanaan dan Pembinaan Transportasi, membawahi:

- a). Seksi Perencanaan dan Evaluasi Transportasi.
 - b). Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi.
 - c). Seksi Bina Transportasi.
3. Bidang Manajemen Transportasi dan parkir, membawahi:
 - a). Seksi Manajemen Transportasi.
 - b). Seksi Manajemen Perparkiran.
 - c). Seksi Manajemen Angkutan.
 4. Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi, membawahi:
 - a). Seksi Ketertiban Transportasi.
 - b). Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
 - c). Seksi Pengaturan Transportasi.
 5. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, membawahi:
 - a). Seksi Perlengkapan jalan.
 - b). Seksi Sarana angkutan.
 - c). Seksi Prasarana.
 6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum pembuatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018 yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi PD;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
 - h. Permendagri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
 - i. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.
 - j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022 ini, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban. Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022 ini dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandung.

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2022 ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja APBD sudah disahkan.

- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
Bab ini membahas telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab ini membahas Program dan Kegiatan serta pendanaannya.
- Bab V Penutup
Bab ini memuat uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap pelaksanaan program kerja tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2021 disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come) / kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2019	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7)/(6)	9	10=5+7+9	11=10/4	
2	Urusan Wajib bukan pelayanan dasar										
2.15	Urusan Wajib Perhubungan										
2.15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%				-	-	-
2.15	01	201	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja</i>	<i>100%</i>				-	-	-
2.15	01	201	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Capaian kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen			-	-	-
2.15	01	202		<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Laporan administrasi keuangan</i>	<i>3 Laporan</i>			<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>33,33</i>
2.15	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan pembayaran gaji dan tunjangan	42 laporan			14 laporan	14 laporan	33,33



2.15	01	205		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%					100%	100%	33,33
2.15	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1065 stel					355 stel	355 stel	33,33
2.15	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	9 orang					3 orang	3 orang	33,33
2.15	01	206		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi umum perangkat daerah	100%					100%	100%	33,33
2.15	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	36 laporan					12 laporan	12 laporan	33,33
2.15	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan pengadaan alat tulis kantor	36 laporan					12 laporan	12 laporan	33,33
2.15	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	36 laporan					12 laporan	12 laporan	33,33
2.15	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak Dan Pengadaan	36 laporan					12 laporan	12 laporan	33,33



2.15	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	12 jenis					4 jenis	4 jenis	33,33
2.15	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	36 laporan					12 laporan	12 laporan	33,33
2.15	01	207		<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%					100%	100%	33,33
2.15	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit					2 unit	2 unit	33,33
2.15	01	207	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeulair Dinas	3 set					1 set	1 set	33,33
2.15	01	208		<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%					100%	100%	33,33



2.15	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan pelayanan surat menyurat	36 laporan					12 laporan	12 laporan	33,33
2.15	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	36 laporan					12 laporan	12 laporan	33,33
2.15	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36 laporan					12 laporan	12 laporan	33,33
2.15	01	209		<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%					100%	100%	33,33
2.15	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	36 laporan					12 laporan	12 laporan	33,33
2.15	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	9 unit					3 unit	3 unit	33,33
2.15	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	36 laporan					12 laporan	12 laporan	33,33



2.15	01	209		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	IKM	84					83	83	100
2.15	01	209	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Parkir)	IKM	84					83	83	100
2.15	01	209	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Angkutan)	IKM	84					83	83	100
2.15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketercapaian tertib dan keselamatan lalu lintas	25%					15%	15%	15
2.15	02	2.01		Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	90 dokumen					30	30	33,33
2.15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan	90 dokumen					30	30	33,33



2.15	02	2.02		<i>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase prasarana jalan yang terbangun</i>	100%					60%	60%	60
2.15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan yang terbangun	51 unit					17	17	33,33
2.15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang dibangun	21 jenis					7	7	33,33
2.15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Prasarana jalan yang dipelihara	3 unit					1	1	33,33
2.15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	perlengkapan jalan yang dipelihara	411 titik					137	137	33,33
2.15	02	2.03		<i>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	<i>Jumlah Terminal penumpang tipe C yang dikelola</i>	18 lokasi					6	6	33,33
2.15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Tersedianya jasa kebersihan terminal	36 bulan					12	12	33,33
2.15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang dipelihara	18 unit					6	6	33,33



2.15	02	2.05		<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Persentase kendaran umum yang lulus uji</i>	91%					90,5%	90,5%	99,45
2.15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana / prasarana pengujian kendaraan bermotor	3 set					1	1	33,33
2.15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Uji petik kendaraan bermotor	18 kali					6	6	33,33
2.15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor	3 set					1	1	33,33
2.15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi / edukasi SOP dan kebijakan bidang perhubungan	9 kali					3	3	33,33
2.15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor	3 set					1	1	33,33
2.15	02	2.06		<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah simpang tertib lalu lintas</i>	15 simpang					5	5	33,33
2.15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Laporan pengaturan lalu lintas	36 laporan					12	12	33,33



				Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas									
2.15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan koordinasi penyelenggaraan CFD / CFN	6 laporan					2	2	33,33
2.15	02	2.08		<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	<i>Keselamatan jalan di persimpangan</i>	<i>15 lokasi</i>					5	5	33,33
2.15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Kampanye publik	12 kali					4	4	33,33
2.15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah penertiban angkutan di jalan raya	660 kali					220	220	33,33
2.15	02	2.09		<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar</i>	<i>Tersedianya angkutan umum massal</i>	<i>9 koridor</i>					9	9	100



				<i>Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>									
2.15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	IKM	83 indeks					84	84	99,45

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung s/d Tahun 2021

Dalam pelaksanaan Renja tahun 2020 realisasi target dapat tercapai, namun ada beberapa kegiatan yang belum dapat mencapai target yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan dari target 4 kali dapat terealisasi sebanyak 3 kali. Hal ini terjadi karena event penilaian Wahana Tata Nugraha tidak jadi dilakukan oleh Kementerian Perhubungan seiring terbitnya peraturan baru yang menetapkan bahwa penilaian dilakukan dari semula setahun sekali menjadi dua tahun sekali.
2. Kegiatan Pembangunan jembatan penyeberangan orang, dari target 1 unit belum bisa direalisasikan mengingat anggaran pembangunan fisik konstruksinya mengalami refocusing untuk penanganan covid.
3. Kegiatan Kampanye publik keselamatan jalan, dari target 4 kali dapat direalisasikan sebanyak 3 kali, 1 kali pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan sehubungan adanya pemberlakuan PSBB.
4. Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya, dari target 240 kali terealisasi sebanyak 200 kali karena sebagian waktu terhambat oleh adanya psbb.
5. Kegiatan Perencanaan Prasarana dan Sarana Perhubungan, dari target 13 dokumen terealisasi 12 dokumen, 1 dokumen tidak dapat direalisasikan karena anggarannya dialihkan untuk penanganan covid.
6. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pengukuran Kinerja Transportasi, dari target 10 laporan terealisasi 8 laporan, 2 laporan (Sehubungan adanya PSBB maka dua dokumen survey di TW 2 tidak dapat dilaksanakan).
7. Kegiatan Pembinaan dan Edukasi Transportasi Ramah Lingkungan (Eco Transport), dari target 4 kali sosialisasi terealisasi hanya 1 kali, Mengingat adanya larangan kerumunan selama masa pandemi maka kegiatan pembinaan dan edukasi yang mengumpulkan banyak orang tidak dapat dilaksanakan.

8. Kegiatan Pemeliharaan dan operasional sarana prasarana parkir, dari target 443 mesin parkir yang beroperasi terealisasi sebanyak 313 unit, sebanyak 120 unit mesin parkir tidak dapat dioperasikan karena adanya kerusakan sebagian akibat vandalisme.
9. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan, dari target 127 buah terelisasi sebanyak 63 buah karena sebagian anggaran terkena refocusing penanganan covid.
10. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Car Free Day / Car Free Night , target 2 laporan realisasi 1 laporan karena adanya larangan berkerumun sehingga Car Free night belum sempat dilaksanakan.

Dinas Perhubungan Kota Bandung akan tetap berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi perkembangan selanjutnya. Hal tersebut akan terus dilakukan sebagai upaya untuk tercapainya sinergitas antar stake holder. Setiap perkembangan yang terjadi akan terus dipantau dan diselaraskan dengan kondisi yang ada sehingga lambat laun akan tercapai sistem transportasi yang lebih baik untuk mendukung Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai lembaga teknis dalam bidang perhubungan, dituntut untuk mampu menyediakan fasilitas sarana prasana transportasi di Kota Bandung yang memadai, mampu memberikan pelayanan yang aman dan lancar bagi masyarakat di Kota Bandung pada umumnya sehingga secara aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota Bandung (*welfare state*).

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam *core strategy* dan *core policy* dan

diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan dalam penyediaan fasilitas perhubungan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban, sehingga adanya keterkaitan antara program Dinas Perhubungan dengan program tingkat Kota Bandung menjadi mutlak.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai beberapa indikator sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan capaian kinerja yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada bagian keenam, yang membahas tentang pengukuran kinerja oleh pemerintah daerah yang selanjutnya kewenangan pemerintah daerah tersebut dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib sesuai dengan pasal 7, ayat (2), Dinas Perhubungan sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai salah satu Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perhubungan di wilayah Kota Bandung mempunyai tugas dan fungsi sangat strategis. Salah satu tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yang sangat strategis yaitu pelayanan di bidang transportasi yang meliputi masalah lalu lintas, parkir, angkutan, terminal, operasional petugas dan pengujian kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak lepas dari berbagai persoalan/masalah yang membutuhkan perhatian cukup serius. Diantaranya adalah masalah penanggulangan kemacetan yang dirasakan cukup signifikan di beberapa ruas jalan terutama pada jam-jam sibuk baik pada hari kerja maupun pada saat hari libur (khususnya pada saat *long week end*).

Penanganan kemacetan di Kota Bandung cukup memberikan dampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Bandung termasuk diantaranya Bandung bebas Macet. Seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor maka bertambah pula emisi gas buang carbon yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Hal tersebut cukup memberikan dampak pada kondisi udara bersih di Kota Bandung. Selain itu kemacetan pun berdampak pada pemborosan BBM yang dipakai kendaraan bermotor.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung khususnya di bidang transportasi melahirkan suatu tantangan dan juga peluang tersendiri. Diantara tantangan yang dihadapi adalah upaya pemecahan masalah kemacetan di tengah meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak berimbang dengan penambahan kapasitas jalan. Tantangan ini menjadi peluang tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Perhubungan untuk mengoperasikan angkutan umum massal yang mana hal ini diharapkan bisa menekan penggunaan

kendaraan pribadi untuk kembali beralih menggunakan sarana transportasi umum.

Untuk itu tidaklah berlebihan apabila pengoperasian angkutan umum massal menjadi isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang direncanakan dalam perumusan program maupun kegiatan prioritas yang perlu ditindaklanjuti. Dinas Perhubungan Kota Bandung telah mengoperasikan masing-masing 10 bus di 5 koridor yang melayani jalur Cibiru – Cibeureum via Soekarno Hatta, jalur Cicaheum – Cibeureum via jalur tengah, Sarijadi – Cicaheum dan Antapani – Leuwi Panjang dan Antapani – St Hall.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk mengetahui kesinergian dan kesesuaian dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Bandung maka diperlukan suatu proses yang akan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Proses tersebut dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana rumusan program dan kegiatan sudah terakomodir pada rancangan awal RKPD tahun anggaran 2022 ataupun besarannya sudah cocok atau sesuai. Hasil review selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:





Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kota Bandung

Nama PD : Dinas Perhubungan Kota Bandung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bandung	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	96.505.644.198	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	96.505.644.198	
1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Laporan Evaluasi Kinerja Dishub</i>	<i>1 Dok</i>	<i>567.452.670</i>	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Laporan Evaluasi Kinerja Dishub</i>	<i>1 Dok</i>	<i>567.452.670</i>	
1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan Kinerja Dishub	5 Laporan	567.452.670	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan Kinerja Dishub	5 Laporan	567.452.670	



2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Laporan administrasi keuangan</i>	<i>1 berkas</i>	<i>51.112.482.449</i>	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Laporan administrasi keuangan</i>	<i>1 berkas</i>	<i>51.112.482.449</i>	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Laporan pembayaran gaji dan tunjangan	14 laporan	51.112.482.449	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Laporan pembayaran gaji dan tunjangan	14 laporan	51.112.482.449	
3	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>674.892.200</i>	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>674.892.200</i>	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	355 stel	178.772.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	355 stel	178.772.000	
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	3 orang	496.120.200	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	3 orang	496.120.200	
4	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Cakupan administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>	<i>2.977.202.240</i>	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Cakupan administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>	<i>2.977.202.240</i>	



4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	12 laporan	206.847.770	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	12 laporan	206.847.770	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan pengadaan alat tulis kantor	12 laporan	1.018.188.680	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan pengadaan alat tulis kantor	12 laporan	1.018.188.680	
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 laporan	729.562.150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 laporan	729.562.150	
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	4 jenis	443.838.040	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	4 jenis	443.838.040	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	173.096.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	173.096.000	
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 laporan	405.669.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 laporan	405.669.600	



5	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>2 unit</i>	<i>260.786.000</i>	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>2 unit</i>	<i>260.786.000</i>	
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit	34.248.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2 unit	34.248.000	
5.2	Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebeulair Dinas	1 set	226.538.000	Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebeulair Dinas	1 set	226.538.000	
6	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>100%</i>	<i>4.558.023.700</i>	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>100%</i>	<i>4.558.023.700</i>	



			<i>Daerah</i>					<i>Daerah</i>		
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan pelayanan surat menyurat	12 laporan	118.946.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan pelayanan surat menyurat	12 laporan	118.946.400
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 laporan	2.223.204.300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 laporan	2.223.204.300
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 laporan	2.215.873.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 laporan	2.215.873.000
7	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	5.257.144.380	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	5.257.144.380
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan		Jumlah laporan Kendaraan Dinas Operasional	12 laporan	3.915.355.720	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan		Jumlah laporan Kendaraan Dinas Operasional	12 laporan	3.915.355.720



*Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022*

	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		terpelihara			Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		terpelihara			
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor	3 unit	1.037.710.660	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor	3 unit	1.037.710.660	
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Laporan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 laporan	304.078.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Laporan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 laporan	304.078.000	
8	<i>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</i>		<i>IKM</i>	74	31.097.660.559	<i>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</i>		<i>IKM</i>	74	31.097.660.559	
8.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Parkir)		IKM	74	25.323.036.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Parkir)		IKM	74	25.323.036.000	
8.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Angkutan)		IKM	74	5.774.624.559	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Angkutan)		IKM	74	5.774.624.559	



B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase ketercapaian tertib dan keselamatan lalu lintas	15%	82.299.499.105	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase ketercapaian tertib dan keselamatan lalu lintas	15%	82.299.499.105
9	<i>Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>	<i>30 dokumen</i>	<i>2.658.339.900</i>	<i>Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>	<i>30 dokumen</i>	<i>2.658.339.900</i>
9.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Dokumen perencanaan	30 dokumen	2.568.339.900	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Dokumen perencanaan	30 dokumen	2.568.339.900
10	<i>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase prasarana jalan yang terbangun</i>	60%	33.471.109.151	<i>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase prasarana jalan yang terbangun</i>	60%	33.471.109.151
10.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah prasarana jalan yang terbangun	17 unit	3.893.760.271	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah prasarana jalan yang terbangun	17 unit	3.893.760.271



*Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022*

10.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah perlengkapan jalan yang dibangun	7 jenis	19.484.127.208	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah perlengkapan jalan yang dibangun	7 jenis	19.484.127.208	
10.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Prasarana jalan yang dipelihara	1 unit	892.375.172	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Prasarana jalan yang dipelihara	1 unit	892.375.172	
10.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		perlengkapan jalan yang dipelihara	137 titik	9.200.846.500	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		perlengkapan jalan yang dipelihara	137 titik	9.200.846.500	
11	<i>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>		<i>Jumlah Terminal penumpang tipe C yang dikelola</i>	<i>6 lokasi</i>	13.575.495.778	<i>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>		<i>Jumlah Terminal penumpang tipe C yang dikelola</i>	<i>6 lokasi</i>	13.575.495.778	
11.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Tersedianya jasa kebersihan terminal	12 bulan	10.075.495.778	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Tersedianya jasa kebersihan terminal	12 bulan	10.075.495.778	
11.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah terminal yang dipelihara	6 unit	3.500.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah terminal yang dipelihara	6 unit	3.500.000.000	



12	<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>		<i>Persentase kendaran umum yang lulus uji</i>	<i>90,5%</i>	<i>6.820.234.477</i>	<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>		<i>Persentase kendaran umum yang lulus uji</i>	<i>90,5%</i>	<i>6.820.234.477</i>	
12.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tersedianya sarana / prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 set	572.988.994	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tersedianya sarana / prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 set	572.988.994	
12.2	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Uji petik kendaraan bermotor	6 kali	86.648.905	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Uji petik kendaraan bermotor	6 kali	86.648.905	
12.3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tersedianya bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor	1 set	3.747.340.200	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tersedianya bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor	1 set	3.747.340.200	
12.4	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Sosialisasi / edukasi SOP dan kebijakan bidang perhubungan	3 kali	1.697.635.376	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Sosialisasi / edukasi SOP dan kebijakan bidang perhubungan	3 kali	1.697.635.376	
12.5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terpeliharanya sarana prasarana pengujian kendaraan	1 set	715.621.002						



			bermotor							
13	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah simpang tertib lalu lintas</i>	<i>15 simpang</i>	<i>10.827.381.165</i>	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah simpang tertib lalu lintas</i>	<i>15 simpang</i>	<i>10.827.381.165</i>
13.1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Laporan pengaturan lalu lintas	12 laporan	10.352.752.800	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Laporan pengaturan lalu lintas	12 laporan	10.352.752.800
13.2	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Laporan koordinasi penyelenggaraan CFD / CFN	2 Laporan	0	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Laporan koordinasi penyelenggaraan CFD / CFN	2 Laporan	0
13.2	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota		Laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	4 laporan	200.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota		Laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	4 Lapran	200.000.000
13.3	Pengawasan dan		Laporan	4	200.000.000	Pengawasan dan		Laporan	4	200.000.000



	Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota		pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan	laporan		Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota		pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan	laporan	
13.4	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Laporan pelaksanaan forum LLAJ	4 laporan	74.628.365	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Laporan pelaksanaan forum LLAJ	4 laporan	74.628.365
14	<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>		<i>Keselamatan jalan di persimpangan</i>	<i>5 lokasi</i>	<i>2.092.947.535</i>	<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>		<i>Keselamatan jalan di persimpangan</i>	<i>5 lokasi</i>	<i>2.092.947.535</i>
14.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Jumlah Kampanye publik	4 kali	108.962.800	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Jumlah Kampanye publik	4 kali	108.962.800
14.2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan		Jumlah penertiban angkutan di jalan raya	220 kali	1.983.984.735	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen		Jumlah penertiban angkutan di jalan raya	220 kali	1.983.984.735



	Angkutan Umum					Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					
15	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Tersedianya angkutan umum massal</i>	<i>9 koridor</i>	<i>12.743.991.099</i>	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Tersedianya angkutan umum massal</i>	<i>9 koridor</i>	<i>12.743.991.099</i>	
15.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		IKM	74 indeks	12.593.991.099	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		IKM	74 indeks	12.593.991.099	
15.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) kabupaten / kota		Laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum Hari Lebaran Natal dan tahun baru	3 Laporan	150.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) kabupaten / kota		Laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum Hari Lebaran Natal dan tahun	3 Laporan	150.000.000	



							baru			
16	<i>Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Dokumen laporan andalalin	4 Laporan	200.000.000	<i>Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Dokumen laporan andalalin	4 Laporan	200.000.000
16.1	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	4 Laporan	200.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	4 Laporan	200.000.000
C	Program Pengelolaan Perkereta Apian		<i>JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERKERETAAPIAN DALAM KOTA</i>	<i>1 Dokumen</i>	292.370.300	Program Pengelolaan Perkereta Apian		<i>JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERKERETA APIAN DALAM KOTA</i>	<i>1 Dokumen</i>	292.370.300
17	Penetapan Rencana induk Perkeretapaian		Dokumen LRT	1 Dokumen	292.370.300	Penetapan Rencana induk Perkeretapaian		Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	292.370.300



*Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022*

17.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian		Dokumen LRT	1 Dokume n	292.370.300	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian		Dokumen Perencanaan	1 Dokume n	292.370.300	
JUMLAH TOTAL											
					179.097.513.603					179.097.513.603	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Bandung banyak menerima masukan / usulan baik dari masyarakat luas pada umumnya maupun dari kalangan tertentu pemangku kepentingan. Usulan dan masukan berbagai sumber tersebut diperoleh baik dari saluran resmi berupa musrenbang maupun disampaikan langsung/tidak langsung melalui berbagai media (surat resmi, surat kabar maupun kunjungan).

Dari beberapa usulan dan masukan tersebut ada beberapa diantaranya yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung seperti pembuatan zebra cross, jembatan penyeberangan orang, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, penataan terminal, penyediaan fasilitas halte bus dan sebagainya. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:



Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Bandung

Nama PD : Dinas Perhubungan Kota Bandung

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersebar di kota Bandung	Terpasangnya cermin tikungan	118 unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan telah mencanangkan program keselamatan transportasi yang mana hal ini telah direspon oleh Pemerintah Kota Bandung salah satunya melalui Dinas Perhubungan. Adapun implementasi program keselamatan transportasi meliputi kelayakan pengoperasian sarana transportasi (baru mencakup kendaraan umum), ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang memadai.

Salah satu faktor keselamatan transportasi yaitu kelaikan kendaraan bermotor, hal ini telah diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung melalui uji berkala / KIR bagi kendaraan wajib uji yang terdiri dari kendaraan angkutan umum dan kendaraan angkutan barang (untuk kendaraan pribadi plat hitam belum ada payung hukumnya). Untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini memerlukan beberapa instrumen yang terdiri dari :

a) Balai pengujian kendaraan bermotor

Untuk balai pengujian kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan Kota Bandung telah mengantisipasi dengan membangun gedung pengujian kendaraan bermotor yang terletak di Gede bage setelah selama ini menumpang di area milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang terletak di Jalan Laswi.

b) Peralatan pengujian kendaraan bermotor

Untuk pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor secara bertahap telah diupayakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, secara rutin / berkala peralatan uji tersebut dipelihara dan dikalibrasi ulang agar menghasilkan pengujian kendaraan bermotor yang lebih presisi.

- c) Kelengkapan bukti hasil pengujian kendaraan bermotor
Sebagai bukti bahwa kendaraan wajib uji telah lulus uji dan layak beroperasi maka diberikan kelengkapan hasil uji yaitu buku uji /KIR, tanda samping berupa stiker lengkap dengan data kendaraan dan masa berlaku uji, dan tanda uji berupa segel yang dipasang di badan kendaraan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk tujuan yang ingin dicapai yaitu : Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu :

1. Meningkatnya Ketertiban Berlalu Lintas
2. Meningkatnya Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi
4. Meningkatnya Mobilitas Penduduk Kota dan keselamatan angkutan
5. Meningkatnya Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2022 ini mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya dalam pencapaian visi misi yang dicanangkan Kepala Daerah Kota Bandung.

Untuk tahun 2022 ini Dinas Perhubungan Kota Bandung merencanakan 2 program 14 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 187.642.842.382,- yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:



Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Bandung

Nama PD : Dinas Perhubungan Kota Bandung

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar								
2 15	Urusan Wajib Perhubungan								
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bandung	100%	96.505.644.198	APBD		100%	106.156.208.618
2 15 01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Laporan Evaluasi Kinerja Dishub</i>		<i>1 Dok</i>	<i>567.452.670</i>	APBD		<i>1 Dok</i>	<i>624.197.937</i>



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022

2	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Dishub		5 Laporan	567.452.670			5 Laporan	624.197.937
2	2	02		<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Laporan administrasi keuangan</i>		<i>1 berkas</i>	51.112.482.449	APBD		<i>1 berkas</i>	56.223.730.694
2	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan pembayaran gaji dan tunjangan		14 laporan	51.112.482.449	APBD		14 laporan	56.223.730.694
2	2	05		<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>100%</i>	674.892.200	APBD		<i>100%</i>	742.381.420
2	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		355 stel	178.772.000	APBD		355 stel	196.649.200
2	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat		3 orang	496.120.200	APBD		3 orang	545.732.220
2	2	06		<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan administrasi umum perangkat daerah</i>		<i>12 laporan</i>	2.727.193.230	APBD		<i>12 laporan</i>	2.999.912.553
2	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan		12 laporan	185.038.970	APBD		12 laporan	203.542.867



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022

2	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan pengadaan alat tulis kantor	12 laporan	839.988.470	APBD	12 laporan	923.987.317
2	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 laporan	729.562.150	APBD	12 laporan	802.518.365
2	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengandaan	4 jenis	443.838.040	APBD	4 jenis	488.221.844
2	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	123.096.000	APBD	12 laporan	135.405.600
2	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	12 laporan	405.669.600	APBD	12 laporan	446.236.560
2	2	07		<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>2 unit</i>	<i>163.333.330</i>	APBD	<i>2 unit</i>	<i>179.666.663</i>
2	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit	86.795.330	APBD	2 unit	95.474.863
2	2	07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeulair Dinas	1 set	76.538.000	APBD	1 set	84.191.800



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022

2	2	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	4.879.832.500	APBD		100%	5.367.815.750	
2	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan pelayanan surat menyurat		12 laporan	118.946.400	APBD		12 laporan	130.841.040
2	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik		12 laporan	2.545.013.100	APBD		12 laporan	2.799.514.410
2	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 laporan	2.215.873.000	APBD		12 laporan	2.437.460.300
2	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	5.282.797.260	APBD		100%	5.811.076.986	
2	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan Kendaraan Dinas Operasional terpelihara		12 laporan	3.915.355.720	APBD		12 laporan	4.306.891.292
2	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor		3 unit	1.063.363.540	APBD		3 unit	1.169.699.894



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022

2	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 laporan	304.078.000	APBD	12 laporan	334.485.800
2	2	10		<i>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	<i>IKM</i>	74	31.097.660.559	BLUD	74	34.207.426.615
2	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Parkir)	IKM	74	25.323.036.000	BLUD	74	27.855.339.600
2	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Angkutan)	IKM	74	5.774.624.559	BLUD	74	6.352.087.015
2	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketercapaian tertib dan keselamatan lalu lintas	15%	82.299.499.105	APBD	15%	90.529.449.016



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022

2	2	01	<i>Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>		30 dokumen	2.568.339.900	APBD		30 dokumen	2.825.173.890
2	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan	30 dokumen	2.568.339.900	APBD		30 dokumen	2.825.173.890
2	2	02	<i>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase prasarana jalan yang terbangun</i>		60%	33.471.109.151	APBD		60%	36.818.220.066
2	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan yang terbangun	17 unit	3.893.760.271	APBD		17 unit	4.283.136.298
2	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang dibangun	7 jenis	19.684.127.208	APBD		7 jenis	21.652.539.929



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022

2	2	02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Prasarana jalan yang dipelihara		1 unit	892.375.172	APBD		1 unit	981.612.689
2	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	perlengkapan jalan yang dipelihara		137 titik	9.000.846.500	APBD		137 titik	9.900.931.150
2	2	03		<i>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	<i>Jumlah Terminal penumpang tipe C yang dikelola</i>		<i>6 lokasi</i>	<i>13.575.495.778</i>	APBD		<i>6 lokasi</i>	<i>14.933.045.356</i>
2	2	03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Tersedianya jasa kebersihan terminal		12 bulan	10.075.495.778	APBD		12 bulan	11.083.045.356
2	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang dipelihara		6 unit	3.500.000.000	APBD		6 unit	3.850.000.000
2	2	05		<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Persentase kendaraan umum yang lulus uji</i>		<i>90,5%</i>	<i>6.820.234.477</i>	APBD		<i>90,5%</i>	<i>7.502.257.925</i>



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022

2	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana / prasarana pengujian kendaraan bermotor		1 set	572.988.994	APBD		1 set	630.287.893
2	2	05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Uji petik kendaraan bermotor		6 kali	86.648.905	APBD		6 kali	95.313.796
2	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor		1 set	3.747.340.200	APBD		1 set	4.122.074.220
2	2	05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi / edukasi SOP dan kebijakan bidang perhubungan		3 kali	1.697.635.376	APBD		3 kali	1.867.398.914
2	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor		1 set	715.621.002	APBD		1 set	787.183.102
2	2	06		<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah simpang tertib lalu lintas</i>		<i>15 simpang</i>	10.827.381.165	APBD		<i>15 simpang</i>	11.910.119.282
2	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten /	Laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas		4 laporan	200.000.000	APBD		4 laporan	220.000.000



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022

	Kota								
2 2 06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Laporan pengaturan lalu lintas		12 laporan	10.352.752.800	APBD		12 laporan	11.388.028.080
2 2 06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan koordinasi penyelenggaraan CFD / CFN		2 Laporan	0	APBD		2 Laporan	0
2 2 06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota	Laporan pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan		4 laporan	200.000.000	APBD		4 laporan	220.000.000
2 2 06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan forum LLAJ		4 laporan	74.628.365	APBD		4 laporan	82.091.202
2 2 07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan andalalin		4 laporan	200.000.000	APBD		4 alporan	220.000.000



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022

2	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Laporan pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin		4 laporan	200.000.000	APBD		4 laporan	220.000.000
2	2	08		<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	<i>Keselamatan jalan di persimpangan</i>		<i>5 lokasi</i>	2.092.947.535	APBD		<i>5 lokasi</i>	2.302.242.289
2	2	08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Kampanye publik		4 kali	108.962.800	APBD		4 kali	119.859.080
2	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah penertiban angkutan di jalan raya		220 kali	1.983.984.735	APBD		220 kali	2.182.383.209
2	2	09		<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersedianya angkutan umum massal</i>		<i>9 koridor</i>	12.743.991.099	APBD		<i>9 koridor</i>	14.018.390.209



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022

2	2	09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	IKM		74 indeks	12.593.991.099	APBD		74 indeks	13.853.390.209
2	2	09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum Hari Lebaran Natal dan tahun baru		3 laporan	150.000.000	APBD		3 laporan	165.000.000
5	3			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERKERETAAPIAN DALAM KOTA		1 Dokmen	292.370.300	APBD		1 Dokumen	321.607.330
5	2	01		Penetapan Rencana Induk	Dokumen LRT		1 Dokumen	292.370.300	APBD		1 Dokumen	321.607.330
5	2	01	01	Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen LRT		1 Dokumen	292.370.300	APBD		1 Dokumen	321.607.330



*Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022*

	Jumlah Total				179.097.513.603				197.007.264.964

BAB V

PENUTUP

Bahwa tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandung harus dapat mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran penyelenggaraan perhubungan.

Upaya untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan perhubungan dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas Perhubungan yang dibarengi dengan semangat kebersamaan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan.

Untuk itu diperlukan suatu penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2022 untuk memberikan gambaran tentang rencana Kerja Dinas Perhubungan 1 (satu) tahun kedepan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan baik dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun program kerja yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah Kota Bandung serta digunakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menyelenggarakan jasa transportasi sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan untuk menciptakan Kota Bandung yang bermartabat.

Namun demikian terlepas dari ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung, pelaksanaan program / kegiatan dan pencapaian visi misi Daerah tetap menjadi prioritas utama bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dalam pelaksanaan kegiatan tentu akan menyesuaikan dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku demikian pula dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yang senantiasa mengedepankan

kepentingan masyarakat banyak pada umumnya dan pengguna jasa transportasi pada khususnya.

Sebagai catatan penting bahwa upaya Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi semua permasalahan terkait tugas pokok dan fungsinya, maka sebagai rencana tindak lanjut akan tetap berkoordinasi dengan semua stake holder terkait dan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk dapat mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Berkaitan dengan isu perencanaan berbasis gender, maka Dinas Perhubungan akan menganggarkannya pada kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal yang mana akan dipakai untuk perbaikan ruang tunggu penumpang khusus wanita. Sehingga secara pro aktif Dinas Perhubungan Kota Bandung telah ikut berpartisipasi dan berperan aktif menghadapi isu strategis berbasis gender.